PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI SUMATERA BARAT

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Nama : Putri Nabila Masseva
NIM : 3218136

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allat SWT, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya kepada hamba, sehingga atas kehendak-Nya semua aktivitas keseharian penulis dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dengan seizin-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Barat",** dan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Shalawat serta salam kemuliaan tak lupa pula dimohonkan pada Allah SWT untuk disampaikan kepada junjungan umat yakni nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil meletakkan panji-panji keislaman dan seberkas cahaya iman, sehingga ajaran beliau telah mampu mengangkat derajat manusia dari kehinaan kepada martabat yang setinggi-tingginya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi, pada Program Studi Ekonomi Islam, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Selama proses pembuatan skripsi ini, berbagai hambatan dan kesulitan telah penulis hadapi. Berkat petunjuk dan hidayah dari Allah SWT, do'a kedua orang tua, dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum, Selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Asyari, S.Ag,.M.Si selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Miswardi, M.Hum selaku Wakil Rektor III.
2. Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya.
3. Ibu Rika Widianita, ME selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak Ilham Illahi, S.E, M.Sc selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya, memberikan pengarahan, dorongan serta petunjuk-petunjuk yang sangat berharga dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ariyun Anisah, ME selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan motivasi, dorongan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan karyawati staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
7. Bapak Novi Zulfikar, S.Sos, M.AP selaku kepala UPT Perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan karyawan karyawati staf Perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai sumber ilmu pengetahuan selama di perguruan tinggi ini.
8. Bapak dan Ibu selaku pegawai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi yang telah memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi dan data yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan semangat serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan selalu memberikan rasa cinta, perhatian, kasih sayang, motivasi dan membantu secara moral dan materil serta selalu mengiringi penulis melalui do'a restu, sehingga menjadi energi tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua abangku Harry Virgo Pratama dan Robby Dwi Bahari, dan adikku Muhammad Rizky, terimakasih atas do'a, dukungan dan kasih sayangnya.

11. Sahabat-sahabatku Nela, Ica, Ikan, Wela, Tiara, Fanny, Titik, Laras yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa EI-D 2018 yang telah banyak memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Semua pihak yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah dengan ikhlas turut membantu dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting.*

Terakhir penulis mendo'akan mudah-mudahan seluruh bentuk bantuan yang diterima dari semua pihak, dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri. Amiin.

Bukittinggi, 29 Juli 2022
Penulis

Putri Nabila Masseva
NIM. 3218136

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Barat"**. Disusun oleh Putri Nabila Masseva, NIM 3218136, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Kontribusi PPN dianggap penting bagi pemasukan Negara karena merupakan penyumbang jenis pajak terbesar kedua setelah PPh. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Barat baik secara parsial atau simultan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, data penelitian ini berupa *time series* dalam kurun waktu 2016-2021 dengan data bulanan maka jumlah sampelnya 72 pengamatan. Berdasarkan variabel independen berupa data pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah sedangkan untuk variabel dependen menggunakan penerimaan PPN, maka teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil uji F menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Kata Kunci: Penerimaan PPN, Pertunbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR..... ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah..... 11
C. Batasan Masalah 12
D. Rumusan Masalah..... 12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 13
F. Penjelasan Judul..... 14

BAB II LANDASAN TEORI 16

A. Pajak Pertambahan Nilai 16
   1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai 16
   2. Objek Pajak Pertambahan Nilai 17
   3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai..... 19
   4. Dasar Pengenaan Pajak 19
   5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai..... 20
   6. Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam 21

B. Pertumbuhan Ekonomi 23
1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 23
2. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam 27
3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 28
C. Inflasi 30
1. Pengertian Inflasi 30
2. Macam-macam Inflasi 31
3. Penghitungan Laju Inflasi 32
4. Faktor-faktor Penyebab Inflasi 32
5. Kebijakan untuk Mengatasi Inflasi 34
6. Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam 35
7. Hubungan antara Inflasi dengan Penerimaan PPN 36
D. Nilai Tukar Rupiah 39
1. Pengertian Nilai Tukar Rupiah 39
2. Permintaan dan Penawaran terhadap Valuta Asing 39
3. Sistem Nilai Tukar 40
4. Macam-macam Kurs 41
5. Nilai Tukar Rupiah terhadap Perspektif Ekonomi Islam 41
6. Hubungan Nilai Tukar Rupiah dengan Penerimaan PPN 43
E. KajianTerdahulu 44
F. Kerangka Pemikiran 47
G. Hipotesis 48

BAB III METODE PENELITIAN 50
A. Jenis Penelitian 50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 51
C. Jenis dan Sumber Data 51
D. Populasi dan Sampel 52
E. Definisi Operasional Variabel 53
F. Teknik Pengumpulan Data 57

G. Teknik Analisis Data 58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 64
1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi 64
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi ... 66

B. Hasil Penelitian 68
1. Analisis Statistik Deskriptif 68
2. Hasil Uji Asumsi Klasik 69
3. Hasil Uji Hipotesis 75

C. Pembahasan 80
1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan PPN..... 80
2. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPN 82
3. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN 84

BAB V PENUTUP..... 88

A. Kesimpulan 88
B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 44
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif..... 68
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas 72
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi 74
Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda..... 75
Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 77
Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik F..... 78
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik t..... 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas menggunakan Grafik Histogram..... 70
Gambar 4.2 Grafik Normal Probability Plot..... 71
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara berkembang merupakan negara yang selalu melaksanakan pembangunan nasional, Indonesia sebagai negara berkembang juga berupaya untuk melaksanakan pembangunan nasional secara optimal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakatnya. Salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembangunan adalah berasal dari penerimaan pajak, selain untuk mendanai pembangunan, pajak juga berperan sebagai jembatan untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.[1]

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.[2] Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang tanpa mendapat

[1] Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 20.

[2] Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru* (Jakarta: Indeks, 2017), hal. 5.

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[3]

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial dan berperan penting dalam pembiayaan pembangunan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi penerimaan negara yang besar karena PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya adalah pajak atas konsumsi karena dikenakan atas konsumsi barang atau jasa.[4]

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP). PPN hanya akan dikenakan atas nilai tambah suatu barang atau jasa dan dikenakan pada setiap mata rantai dalam jalur produksi dan distribusi.[5] Pentingnya kegiatan konsumsi dalam kehidupan masyarakat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan manfaat barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup, semakin meningkatnya kegiatan konsumsi masyarakat akan berpengaruh pula terhadap besarnya penerimaan PPN, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkat, sehingga

---

[3] Febrina Fitriani Situmeang, '*Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam*' (Universitas Sumatera Utara, 2019).

[4] Salawati, '*Analisis Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN Pada Kanwil DJP Jakarta Selatan*' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

[5] Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia: Mekanisme Dan Perhitungan* (Yogyakarta: Andi, 2015), hal. 178.

PPN erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Semakin tinggi kegiatan ekonomi, semakin tinggi penerimaan PPN.[6]

PPN merupakan pajak tidak langsung, akibat yuridisnya adalah Penanggung Pajak dan Penanggung Pajak berada pada pihak yang berbeda. Hampir seluruh kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan kata lain semua transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terutang Pajak Pertambahan Nilai. Mengingat penerimaan pajak yang besar dan penting dalam membiayai pembangunan, diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkannya melalui faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan di bidang perpajakan, sedangkan faktor eksternal meliputi perkembangan ekonomi makro karena fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas penerimaan pajak.[7]

Faktor internal yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai target penerimaan perpajakan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi perpajakan adalah kegiatan optimalisasi pemungutan penerimaan pajak atas objek dan subjek pajak yang telah terdaftar atau terdaftar di lingkungan administrasi DJP dan dari hasil ekstensifikasi perpajakan, sedangkan ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak di lingkungan DJP. Pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan bertujuan untuk

---

[6] Amalia Wijayanti, *Aanalisis Penerimaan Pajak Indonesia: Pendekatan Ekonomi Makro* (Semarang, 2015), hal. 124.

[7] Eddi Wahyudi, dkk., 'Dampak Fluktuasi Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak', *Jurnal Ekonomi IPB*, 6.1 (2009).

meningkatkan sumber penerimaan PPN, antara lain dengan meningkatkan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar.[8]

Target penerimaan pajak tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 3,69 persen. Jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak nasional sebesar Rp1.198,44 triliun, porsi penerimaan pajak di Sumbar sangat kecil, hanya 0,49 persen. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Sumbar tumbuh -0,67 persen dibandingkan triwulan II-2019, lebih baik dari penerimaan nasional yang tumbuh -12,06 persen. Tekanan dari kegiatan usaha akibat pembatasan sosial menjadi faktor utama kontraksi penerimaan pajak. Pada tahun 2020 PPN menyumbang 34,85% dari komponen pajak lainnya.[9]

Faktor ekonomi makro sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah. Semua faktor ekonomi makro dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di suatu negara dipengaruhi oleh variabel makroekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Pertumbuhan ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, karena dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka penerimaan pemerintah melalui pajak juga akan semakin baik, karena pembangunan yang terjadi berasal dari rakyat. Indikator untuk

[8] *Ibid*.,

[9] www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar

mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Bruto (PDB).[10]

Pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi akan menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat dalam periode tertentu. Oleh karena itu, pada dasarnya kegiatan ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, kemudian proses ini pada gilirannya akan menghasilkan aliran balas jasa atas faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat.[11] Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu sasaran utama sebagai indikator membaiknya kondisi perbaikan ekonomi. Pertumbuhan yang tinggi akan mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat tentunya akan meningkatkan pendapatan PPh dan PPN karena konsumsi masyarakat juga meningkat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Puspitha dan Supadmi, dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, karena memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) dan t_{hitung} nya lebih besar dari t_{tabel}.

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2020 yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp242,12 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp44,03 juta atau

[10] Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makroekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 110.

[11] N. Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2007), hal. 65

US$3.141,97. Perekonomian Sumbar pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,60 persen, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,01 persen. Dari sisi produksi, kinerja sektor pertanian yang menjadi penyumbang terbesar perekonomian Sumbar mengalami pertumbuhan yang melambat, dari 2,51 persen pada 2019 menjadi 1,19 persen pada 2020. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar 2,47 persen pada tahun 2020, sedangkan pada tahun sebelumnya tumbuh 4,74 persen. Perekonomian Sumbar pada triwulan IV-2020 jika dibandingkan dengan triwulan IV-2019 (y-on-y) mengalami kontraksi yang cukup tajam yaitu sebesar 2,23 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,09 persen.[12]

Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah inflasi. Inflasi adalah fenomena ekonomi yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan terus menerus. Jika hanya satu atau dua jenis barang yang naik, itu bukan inflasi.[13] Inflasi memiliki dampak yang cukup besar terhadap perekonomian. Perubahan inflasi yang fluktuatif dan terus menerus dapat mempengaruhi keseimbangan dan stabilitas perekonomian global, termasuk para pelaku ekonomi. Inflasi yang tinggi akan berdampak pada peningkatan harga jual dan peningkatan laba perusahaan, sehingga mendorong peningkatan penerimaan utang PPN.

Menurut Sukirno, kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi berupa: kebijakan fiskal dengan menaikkan pajak dan mengurangi

[12] www.bps.go.id

[13] Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 186.

pengeluaran pemerintah, kebijakan moneter dengan mengurangi, menaikkan suku bunga dan membatasi kredit dan syarat pasokan dasar dengan mengambil langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga, seperti mengurangi pajak impor dan pajak bahan mentah, menetapkan harga, mendorong peningkatan produksi, dan mendorong pengembangan teknologi.[14]

Menurut Indriastuti, tingkat inflasi yang dapat dijaga tetap rendah dan stabil tentunya akan berdampak baik bagi kegiatan perekonomian. Dampak ini terutama akan berhubungan dengan konsumsi masyarakat. Inflasi yang rendah dan stabil akan meningkatkan konsumsi masyarakat, salah satu sektor yang diuntungkan dari peningkatan konsumsi masyarakat adalah sektor perpajakan. Jika konsumsi masyarakat atas barang dan jasa meningkat, maka penerimaan pajak berupa PPN dan PPnBM juga akan meningkat.[15]

Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian terkait hubungan inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, menurut penelitian yang dilakukan oleh Salawati menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian Yeni, dkk., dan Dwi Nuraeni juga menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun berbeda dengan penelitian Saefi Nurfajriani yang menyatakan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

---

[14] Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 354.

[15] Ria Indriastuti, '*Pengaruh Pendapatan Perkapita, Inflasi Dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia*' (Universitas Diponegoro, 2017).

Ada dua kota pengukur inflasi di Sumatera Barat, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Pada bulan Desember 2020, Kota Padang mengalami inflasi sebesar 0,71 persen dan Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 0,39 persen. Sumatera Barat (gabungan dua kota) tingkat inflasi adalah 0,67 persen. Sementara itu, laju inflasi tahun kalender sampai dengan Desember 2020 di Kota Padang sebesar 2,12 persen dan laju inflasi Kota Bukittinggi sebesar 2,02 persen. Sumatera Barat (gabungan dua kota) laju inflasinya 2,11 persen. Laju inflasi tahun 2020 melebihi laju inflasi nasional sebesar 1,68 persen.

Selama periode tahun 2020, tingkat inflasi di Sumatera Barat berfluktuasi. Inflasi terjadi enam kali. Laju inflasi tahun 2020 di Sumbar juga dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai merah, emas perhiasan, rokok putih. Cabai merah masih menjadi komoditi yang memberikan sumbangan inflasi terbesar di Sumatera Barat, masing-masing sebesar 0,67 persen di Kota Padang dan 0,42 persen di Kota Bukittinggi. Tingginya harga cabai merah disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya pasokan akibat tingginya curah hujan di beberapa daerah yang menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas hasil cabai merah.[16]

Variabel makroekonomi selanjutnya yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah nilai tukar rupiah, nilai tukar rupiah adalah jumlah uang dalam negeri yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Jika nilai tukar melemah, maka harga barang dan jasa yang

[16] Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *Kajian Fiskal Regional 2020*, hal.15-16

dikonsumsi masyarakat akan meningkat. Jika harga barang dan jasa meningkat maka akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat dan akan berdampak pada penerimaan PPN. Melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan konsumsi masyarakat rendah sehingga pengusaha yang menyerahkan barang dan atau jasa akan berpikir untuk mengurangi produksinya dan berdampak pada penerimaan pajak khususnya penerimaan PPN, karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi, hal ini situasi tersebut secara langsung dapat berdampak pada penurunan penerimaan pajak terhadap konsumsi.[17]

Penguatan dan pelemahan nilai tukar rupiah akan mempengaruhi harga bahan baku impor yang harus dibeli perusahaan sehingga akan mempengaruhi harga jual, harga barang kena pajak dan jasa. Jika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS, maka bahan baku impor dari Amerika Serikat akan menjadi lebih mahal. Hal ini menuntut para pengusaha mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan produksi yaitu dengan menggunakan bahan baku dalam negeri hingga nilai tukar dolar stabil, sehingga dapat disimpulkan, jika nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS akan mendorong peningkatan permintaan bahan baku dalam negeri karena meningkatnya permintaan bahan baku impor. Semakin besar permintaan bahan baku dalam negeri, semakin tinggi PPN yang dipungut dari objek pajak.[18] Pemerintah terus melakukan upaya agar nilai tukar rupiah tidak semakin merosot dan

[17] Fitriani Situmeang.

[18] Nuryani, '*Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Indonesia*' (Universitas Lampung, 2016).

membuat kebijakan baru untuk meningkatkan perekonomian agar nilai tukar rupiah dapat memperkuat dan menstabilkan kondisi perekonomian yang mempengaruhi penerimaan negara di bidang perpajakan.

Menurut Febriani Fitriani Situmeang, menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, karena nilai signifikansi 0,001 < 0,005 dan t_{hitung} = 3,499 lebih besar dari t_{tabel} = 2,0369. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Sinambela dan Suci yang menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dalam negeri periode Januari 2013 sampai Desember 2017.

Rata-rata nilai tukar rupiah (JISDOR) terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 mencapai Rp14.576,8 per US$. Kembali stabilnya volatilitas pasar keuangan yang mendorong pemulihan aliran modal ke pasar keuangan domestik, peningkatan PMI manufaktur yang menandai pemulihan ekonomi, perkembangan neraca perdagangan, dan optimisme perkembangan vaksin di dalam negeri turut berkontribusi. sentimen positif di pasar keuangan domestik yang mendukung nilai tukar Rupiah. Meski demikian, Rupiah masih terdepresiasi 1,51 persen dibandingkan dengan nilai tukar awal tahun 2020. Tren nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2020 mengalami penguatan seiring dengan sentimen positif di pasar keuangan akibat sentimen positif. perkembangan dalam pengembangan vaksin. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada 30 Desember 2020 berada

pada level Rp14.051/USD. Dengan demikian, rata-rata nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2020 tercatat sebesar Rp14.576,8/USD.[19]

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Barat".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, beberapa masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya perubahan inflasi yang fluktuasi mempengaruhi keseimbangan dan stabilitas perekonomian secara global terhadap penerimaan PPN di Provinsi Sumatera Barat.
2. Melemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan naiknya harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berdampak langsung terhadap penerimaan PPN di Provinsi Sumatera Barat.
3. Penerimaan PPN belum terealisasi dengan baik sehingga target penerimaan yang diinginkan pemerintah Sumatera Barat masih jauh dari target.
4. Adanya ketidakkonsistenan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN di Provinsi Sumatera Barat.

[19] Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *Kajian Fiskal Regional 2020*, hal.17

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar lebih fokus sesuai dengan model yang penulis kembangkan, perlu ditegaskan batasan masalah yang akan dibahas, yaitu periode penelitian untuk data selama 6 tahun (2016-2021) Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai diperoleh dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Sumatera Barat dan Jambi. Kajian ini mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah periode 2016-2021 di Provinsi Sumatera Barat.

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, maka masalah yang akan menjadi objek penelitian penulis adalah:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kanwil DJP Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kanwil DJP Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kanwil DJP Sumatera Barat?
4. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama terhadap penerimaan PPN di Kanwil DJP Sumatera Barat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah:

a. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN di Kanwil DJP Sumatera Barat.
b. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN di Kanwil DJP Sumatera Barat.
c. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN di Kanwil DJP Sumatera Barat.
d. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama terhadap penerimaan PPN di Kanwil DJP Sumatera Barat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Berguna untuk menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN di Kanwil DJP Sumatera Barat.
b. Bagi pemerintah, dapat menjadi tolak ukur yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN di Sumatera Barat dan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan suatu kebijakan.

c. Bagi pihak lain yang berkepentingan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

d. Bagi penulis yaitu untuk sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman antara penulis dan pembaca, dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penelitian ini, penulis perlu menyatakan konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

1. Pengaruh: adalah dampak kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.
2. Pertumbuhan ekonomi: adalah suatu proses perubahan kondisi ekonomi yang terjadi di suatu negara secara berkelanjutan untuk menuju suatu keadaan yang dianggap lebih baik untuk jangka waktu tertentu.
3. Inflasi: adalah kenaikan harga barang-barang secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya.[20]
4. Nilai tukar rupiah adalah harga suatu mata uang terhadap uang lain atau nilai suatu mata uang terhadap nilai mata uang lain dimana kenaikan nilai tukar mata uang domestik disebut sebagai apresiasi mata uang asing.

[20] Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 27.

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP).[21]

[21] Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Op. Cit*, hal. 178.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[22]

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertahap pada setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis dan pola konsumsi masyarakat yang menjadi objek PPN.[23] Undang-undang yang mengatur tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah

[22] Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi Terbaru 2018* (Yogyakarta: Andi, 2018), hal. 1.

[23] TMbooks, *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2015), hal. 316.

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang-undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.[24]

Ada beberapa karakteristik pajak pertambahan nilai secara umum, yaitu:

a. Pajak tidak langsung
b. Pajak Objektif
c. *Multistage Tax*
d. Non-kumulatif
e. Tarif Tunggal
f. *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method*
g. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri
h. *Consumption Type Value Added Tax* (VAT).[25]

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

a. Penyampaian BKP dalam daerah pabean oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pengusaha yang seharusnya telah dikukuhkan sebagai PKP, namun belum dikukuhkan. Penyerahan barang kena pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) Barang berwujud yang diserahkan adalah BKP.

[24] Mardiasmo, *Op. Cit*, hal. 321.
[25] Siti Resmi, *Perpajakan; Teori Dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 2-3.

2) Barang tidak berwujud yang diserahkan adalah BKP tidak berwujud.
3) Pengiriman dilakukan di dalam daerah pabean.
4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan.

b. Impor Barang Kena Pajak (BKP). Penagihan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
c. Penyerahan JKP dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) Jasa yang diserahkan merupakan JKP.
   2) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
   3) Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dimanfaatkan oleh setiap orang di dalam daerah pabean.
e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapa saja di dalam daerah pabean.
f. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.
g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.
h. Ekspor JKP oleh PKP.[26]

[26] TMbooks, *Op. Cit*, hal. 325-326

3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN 1984 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengertian PKP dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984, yaitu pengusaha yang menyerahkan BKP dan/ atau penyerahan JKP atau ekspor BKP. Pengusaha yang menyerahkan BKP dan/atau JKP dalam ketentuan ini meliputi, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maupun pengusaha yang seharusnya sudah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi belum dikukuhkan.

b. Bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP)

Pengusaha bukan Kena Pajak adalah orang pribadi/Badan yang mengimpor BKP, orang pribadi/badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean, dan orang pribadi/badan yang membangun sendiri di luar kegiatan usaha/pekerjaannya.[27]

4. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai dalam bentuk uang yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Untuk menghitung besarnya pajak PPN yang terutang maka perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah:

a. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang

[27] Untung Sukardji, *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 63.

diminta atau harus diminta oleh penjual karena penyerahan BKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

b. Penggantian adalah nilai dalam bentuk uang, termasuk semua biaya yang diminta atau harus diminta oleh penyedia jasa karena penyerahan JKP.
c. Nilai impor adalah nilai dalam bentuk uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepabeanan atas impor barang kena pajak.
d. Nilai ekspor adalah nilai moneter, termasuk semua biaya yang diminta atau harus diminta oleh eksportir.
e. Nilai DPP lainnya adalah nilai yang ditetapkan sebagai DPP karena sulitnya menentukan harga jual atau nilai penggantian yang sebenarnya.[28]

5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Tarif PPN 10% atas impor BKP, penyerahan BKP dan/ JKP, dan pemanfaatan BKP dan atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dalam daerah pabean. Sedangkan tarif PPN sebesar 0% (nol persen) berlaku untuk: ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak

[28] Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana ES , *Perpajakan: Teori & Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 207-208.

berwujud, dan ekspor JKP.

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP terkait kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah berwenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling sedikit 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) selama masih menggunakan prinsip tarif tunggal.[29]

6. Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Al-Qur'an, kata "pajak" tidak ditemukan karena "pajak" tidak berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal dari bahasa Jawa yaitu "*ajeg*" yang berarti pungutan tertentu pada waktu tertentu. Dalam istilah Arab, pajak dikenal dengan nama *Adz-Dharibah*, yang berarti beban. Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan terasa sebagai beban.[30]

Pajak sebenarnya diwajibkan bagi non-Muslim kepada pemerintah Islam sebagai pembayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak diwajibkan atas kaum muslimin, para ulama dari masa sahabat, tabi'in sampai sekarang berbeda pendapat dalam menyikapinya. Pendapat

[29] Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi Terbaru 2018*, hal. 334.

[30] Nur Kholis Kholis, 'Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Malaysia*, August, 2010, 1–23.

pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh dibebankan sama sekali kepada umat Islam, karena umat Islam telah dibebani kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil *syar'i* yang melandasi pendapat ini adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Dalil Al-Qur'an

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."* (QS. Al-Baqarah (2): 188).

b. Berdasarkan Hadits

Janganlah kalian berbuat dzalim beliau mengucapkannya tiga kali, Sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. (HR. Imam Ahmad V/72 no. 20174, dan di shahihkan oleh Al -Albani dalam shahih Wa Dhaif Jami'ush Shagir no. 1761 dan 1459).

Pendapat *kedua*: menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari umat Islam, jika Negara benar-benar membutuhkan dana, dan untuk melaksanakan kebijakan ini harus terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat tertentu.

Setelah menjelaskan kedua pendapat para ulama di atas beserta

dalil-dalilnya, maka jalan tengah dari kedua perbedaan pendapat tersebut adalah tidak ada kewajiban atas harta yang dimiliki oleh seorang muslim selain zakat. Namun jika timbul kondisi yang memerlukan tambahan kebutuhan darurat, maka akan ada tambahan kewajiban lain berupa pajak/*dharibah*. Pendapat ini sebagaimana diungkapkan oleh al-Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Asy-Syathibi, Mahmud Shaltut dan lain-lain.[31]

B. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.[32]

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, *Gross National Product* (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan peningkatan Produk Nasional

[31] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Perrs, 2007).

[32] Windhu Putra, *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan Di Indonesia*, hal. 41.

Bruto (PNB) riil atau Produk Domestik Bruto (PDB) dari waktu ke waktu atau peningkatan pendapatan per kapita dari waktu ke waktu.[33]

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah:

a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung sejauh mana sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.

b. Faktor Sumber Daya Alam (SDA)

Sebagian besar Negara berkembang mengandalkan sumber daya alam dalam melakukan proses pemabngunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, jika tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola SDA yang tersedia.

c. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong percepatan proses pembangunan, perubahan pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih yang berdampak pada efisiensi, kualitas dan kuantitas dari rangkaian kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan dan

[33] Telisa Aulia Falianty, *Teori Ekonomi Makro Dan Penerapannya Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 149.

pada akhirnya berdampak pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi.

d. Faktor Budaya

Faktor ini dapat berfungsi sebagai generator atau penggerak proses pembangunan ekonomi tetapi juga dapat menjadi penghambat pembangunan.

e. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan oleh manusia untuk mengolah Sumber Daya Alam dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknolgi. Sumber daya modal berupa barang modal sangat penting bagi pembangunan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.[34]

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu tahun tertentu dengan PDB tahun sebelumnya. Setiap negara atau pemerintah pasti ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal, sesuai dengan potensi negara tersebut. Namun, yang umumnya terjadi adalah pertumbuhan ekonomi tidak tercapai secara optimal.[35]

Pertumbuhan ekonomi sebagian besar diukur dengan peningkatan

[34] Windhu Putra, *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan Di Indonesia*, hal. 41-42.

[35] Ambok Pangiuk, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013', *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2.2 (2018), 44 <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.160>.

jumlah pendapatan daerah dalam periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan asli daerah pada tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan asli daerah pada tahun sebelumnya. Pendapatan nasional sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu Provinsi dihitung secara riil atau menurut harga tetap dengan harga pada tahun-tahun tertentu yang berbeda dengan tahun penghitungan produksi nasional.

Untuk melihat besar kecilnya pertumbuhan ekonomi daerah, yang sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu besarnya nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu.[36] Metode penghitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

a. Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh satu unit kegiatan ekonomi di suatu daerah dikurangi biaya antara setiap total produksi bruto setiap subsektor atau kegiatan sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit produksi dalam penyajiannya dikelompokan menjadi 9 sektor atau bidang usaha, yaitu; (a) Pertanian; (b) pertambangan dan penggalian; (c) industri pengolahan; (d) listrik, gas dan air bersih; (e) bangunan; (f) perdagangan, hotel, dan restoran; (g) transportasi dan komunikasi; (h) keuangan perusahaan, leasing dan jasa; dan (i) jasa-

[36] Tarigan Robinson, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Salemba, 2012), hal. 75.

jasa.

b. Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah jumlah dari semua komponen permintaan akhir. Komponen-komponen ini meliputi: (a)Pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, (b)Konsumsi pemerintah, (c)Pembentukan modal tetap domestik bruto, (e)perubahan stok, (f)Ekspor netto.

c. Menurut pendekatan pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Imbalan untuk faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua perhitungan ini sebelum dikurangi pajak penghasilan dan pajak lainnya.[37]

2. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam kajian ekonomi Islam, isu pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasan ini berangkat dari firman Allah Ta'ala, surat Hud ayat 61 yang artinya: "*Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya*". Artinya, bahwa Allah Ta'ala. menjadikan kita sebagai wakil bagi kemakmuran bumi. Istilah "pemakmuran bumi" ini mengandung pengertian pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernur

[37] https://www.bps.go.id/

di Mesir: "*Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan oleh pemakmuran bumi. Barangsiapa memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur*."[38]

Perbedaan utama antara konsep pertumbuhan dalam Islam dan konvensional terletak pada prinsip-prinsip yang digunakan, dalam Islam unsur spiritualitas (agama) menjadi prioritas utama. Dimanifestasikan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Meskipun prinsip pertumbuhan ekonomi dalam Islam didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits, namun ia tidak merinci secara detail mengenai masalah teknis, tetapi hanya menjelaskan secara global yang meliputi petunjuk dasar, aturan, prinsip dan cabang-cabang penting yang bersifat spesifik, karena masalah ekonomi termasuk masalah kemanusiaan yang dapat berubah sesuai dengan lingkungan dan perkembangan zaman.

3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang meningkatkan produksi barang dan jasa oleh suatu masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan pertumbuhan yang berkelanjutan akan membantu penerimaan PPN karena pertumbuhan ekonomi yang baik

[38] Abdullah Abdul Husain Al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hal. 282-283.

akan menjamin kelangsungan konsumsi BKP dan JKP di masyarakat. Semakin tinggi elastisitas pajak, semakin tinggi pula penerimaan Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap tambahan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang baik membantu menaikkan tarif pajak. Salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.[39]

Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin tinggi pula pendapatan masyarakat dan semakin tinggi pula daya beli atau kemampuan masyarakat untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah termasuk pajak. Jika PDRB suatu daerah meningkat, berarti kemampuan membayar pajak juga meningkat. Dengan kata lain, potensi penerimaan pajak juga semakin besar. Pernyataan di atas didukung oleh penelitian Wijaya yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.[40]

---

[39] https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 15.10 WIB

[40] Alif Aldiat Pahala dan Muhammad Muslih, 'Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada DJP Kanwil I Jawa Barat Bandung Tahun 2015-2018)', *E-Proceeding of Management*, 7.2 (2020), 3083–90.

C. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi adalah penurunan nilai uang (kertas) karena jumlah dan kecepatan uang (kertas) yang beredar sehingga menyebabkan harga barang naik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus (terus menerus) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya konsumsi masyarakat atau tidak lancarnya distribusi barang.[41]

Inflasi pada dasarnya tidak didefinisikan sebagai tingkat harga yang rendah. Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Dikatakan inflasi terjadi ketika proses kenaikan harga berlangsung terus menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi dapat dikatakan sebagai penyakit ekonomi yang menimpa hampir semua negara. Secara umum, negara yang mengalami inflasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a. Harga barang pada umumnya akan naik terus-menerus.
b. Jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan.
c. Nilai uang atau daya beli uang mengalami penurunan.

[41] Sri Kartini, *Mengenal Inflasi*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hal. 5-6.

d. Jumlah barang relatif sedikit.[42]

2. Macam-macam Inflasi

a. Inflasi Berdasarkan Tingkat Kualitas

Inflasi jenis ini dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu inflasi ringan dengan persentase dibawah 10% setahun, inflasi sedang persentasenya 10%-30% setahun, inflasi tinggi persentasenya 30%-100% setahun, dan hiperinflasi dengan persentase di atas 100% per tahun. Hiperinflasi adalah inflasi yang tidak terkendali, suatu kondisi ketika harga naik begitu cepat dan nilai uang turun drastis.[43]

b. Inflasi Berdasarkan Penyebab

1) Inflasi Permintaan (*Demand-Pull Inflation*)

Inflasi ini terjadi karena permintaan total (agregat) masyarakat yang terus meningkat atau berlebihan sehingga menyebabkan perubahan tingkat harga. Dalam inflasi ini, permintaan barang dan jasa meningkat karena permintaan faktor-faktor produksi meningkat. Jika permintaan faktor produksi meningkat, maka harga faktor produksi juga akan meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena adanya peningkatan permintaan total pada saat perekonomian di suatu daerah dalam keadaan *full employment*.

2) Inflasi karena kenaikan biaya produksi (*Cost-Push Inflation*)

[42] *Ibid*., hal. 3-4.
[43] *Ibid*., hal. 19-20.

Inflasi ini terjadi karena kenaikan biaya berbagai faktor produksi (input) yang mengakibatkan kenaikan harga barang (output) yang dihasilkan. Ketika permintaan menurun, jumlah produksi juga berkurang. Jika demikian, permintaan bahan baku sebagai faktor produksi juga akan menurun.[44]

3. Penghitungan Laju Inflasi

Inflasi diukur dengan menghitung persentase perubahan tingkat perubahan suatu indeks harga. Indeks harga tersebut antara lain: Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks yang mengukur harga rata-rata barang tertentu yang dibeli konsumen; indeks biaya hidup; Indeks Harga Produsen (IHP) adalah indeks yang mengukur harga rata-rata barang yang dibutuhkan oleh produsen; indeks harga komoditas; indeks harga barang modal; dan deflator PDB yang menunjukkan besarnya perubahan harga semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Biasanya mengukur tingkat inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Tingkat inflasi adalah tingkat perubahan tingkat harga umum.[45]

4. Faktor-faktor Penyebab Inflasi

Terdapat beberapa sumber utama yang menjadi penyebab timbulnya inflasi, yaitu:

[44] *Ibid*., hal. 21-26
[45] *Ibid*., hal. 47-48.

a. Jumlah Uang yang Beredar

Jumlah uang yang beredar merupakan sumber utama inflasi di setiap negara. Sebab, masih ada anggapan bahwa uang kuasi hanya bagian dari likuiditas perbankan. Hal ini ditunjukkan dengan persentase jumlah uang yang beredar lebih kecil dari persentase uang giral yang beredar.

b. Defisit Anggaran Belanja Pemerintah

Dengan adanya campur tangan pemerintah, berarti belanja APBN lebih besar dari pendapatan rutin. Artinya pengeluaran pemerintah untuk investasi tidak dapat diimbangi dengan penerimaan, sehingga terjadi kesenjangan antara pengeluaran negara dan penerimaan, atau dapat dikatakan telah terjadi defisit struktural keuangan negara.[46]

c. Penawaran Agregat dan Luar Negeri

Penawaran agregat dan luar negeri dapat mengalami kelambanan penyesuaian terhadap peningkatan permintaan agregat yang lebih besar. Hal ini disebabkan adanya hambatan struktural (*structural bottleneck*) yang ada di Indonesia. Kenaikan harga bahan pangan menjadi penyebab inelastisnya penawaran bahan pangan menjadi penyebab elastisnya pasokan pangan yang memicu terjadinya inflasi. Selain harga bahan pangan, penyumbang inflasi lainnya dari

[46] *Ibid*., hal. 32-34.

sisi penawaran agregat berupa inflasi impor, barang-barang yang diatur, kesenjangan output, dan suku bunga.[47]

5. Kebijakan untuk Mengatasi Inflasi

Secara garis besar ada tiga cara mengatasi atau menanggulangi inflasi, yaitu:

a. Kebijakan fiskal adalah kebijakan keuangan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam kaitannya dengan anggaran negara. Langkah-langkah untuk melaksanakan kebijakan fiskal melalui instrumen berikut, mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, dan memberikan pinjaman pemerintah.[48]
b. Kebijakan moneter adalah segala kebijakan pemerintah di bidang keuangan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas moneter guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah melalui Bank Sentral mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan kebijakan moneter, terutama menjaga stabilitas jumlah uang beredar, yaitu kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar.
c. Kebijakan nonmoneter adalah kebijakan yang tidak berkaitan dengan keuangan pemerintah atau jumlah uang yang beredar. Langkah-langkah yang mencakup kebijakan nonmoneter, yaitu: sanering, devaluasi, peningkatan output produksi, kebijakan pengupahan,

[47] *Ibid*., hal. 36.
[48] *Ibid*., hal. 52-53.

pengendalian harga dan distribusi barang, serta kebijakan yang berkaitan dengan output.[49]

6. Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam tidak dikenal dengan istilah inflasi, karena mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham yang memiliki nilai stabil dan dibenarkan oleh Islam.[50] Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364M-1441M), yang merupakan seorang ekonom muslim dan juga salah satu murid Ibnu Khaldun, mengklasifikasikan inflasi menjadi dua kelompok, yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang (*Natural inflation*) dan inflasi karena kesalahan manusia (*human error inflation*). Kondisi defisit pernah terjadi pada masa Nabi dan ini hanya terjadi satu kali yaitu sebelum perang Hunain yaitu karena kekeringan atau karena perang, jenis inflasi pertama ini terjadi pada masa Nabi. Sedangkan inflasi jenis kedua menurut Al-Maqrizi disebabkan oleh tiga hal, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan jumlah uang yang berlebihan.[51]

a. Inflasi Alamiah (*Natural Inflation*)

Ketidakseimbangan *supply* dan *demand* juga pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini Rasulullah SAW tidak ingin menghentikan atau mempengaruhi pergerakan harga ini menurut hadits: *Anas meriwayatkan, ia berkata: Orang-orang berkata kepada*

[49] *Ibid*., hal. 53-57.

[50] Nurul Huda, et. al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 189-190.

[51] *Ibid*.,

Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga untuk kami". Rasulullah SAW lalu menjawab, "Allah-lah Penentu harga, Penahan, Pembentang, dan Pemberi rizki. Aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorangpun yang meminta padaku tentang adanya kedhaliman dalam urusan darah dan harta."

b. Akibat Kesalahan Manusia (*Human Error Inflation*)

Sebagaimana Firman Allah SWT (QS Ar-Rum ayat 41):

النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَهَرَ

يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُمْ

Artinya: *"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."*

7. Hubungan antara Inflasi dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Salah satu rintangan yang dihadapi banyak negara dalam perekonomiannya adalah inflasi, terutama ketika inflasi tinggi. Inflasi mempengaruhi semua variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor dan impor, tabungan, suku bunga, investasi, distribusi

pendapatan, dan pajak.[52] Tingkat inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat dan konsumsi masyarakat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Semakin tinggi konsumsi maka semakin tinggi pula penerimaan pajak pertambahan nilai, karena pajak pertambahan nilai merupakan pajak konsumsi.

Tingkat inflasi akan mempengaruhi harga Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), dan pengenaan PPN merupakan harga dasar BKP dan JKP. Tarif yang dikenakan terhadap PPN setara, yaitu 10% dari harga pembelian. Hal ini membuat inflasi mempengaruhi penerimaan PPN, misalnya harga barang "Y" adalah Rp1.000.000 sebelum inflasi, yang dikenakan PPN sebesar Rp 100.000. Periode selanjutnya, dengan tingkat inflasi yang meningkat, harga barang "Y" meningkat menjadi Rp 1.100.000 dan dikenakan PPN sebesar Rp110.000.[53]

Inflasi mempengaruhi penerimaan PPN karena jika inflasi meningkat maka akan mempengaruhi harga jual barang dan jasa yang menjadi dasar pemungutan pajak (DPP). Hubungan antara inflasi dan penerimaan PPN memiliki dampak positif atau negatif. Jika dilihat dari hubungan yang negatif, inflasi adalah kenaikan harga komoditas secara keseluruhan, yang tentunya akan menurunkan daya beli uang yang diperoleh masyarakat, jika harga naik maka setiap keping uang yang

---

[52] Neriswad, 'Pengaruh Inflasi Terhadap Nilai Riil Penerimaan Pajak Negara: Pendekatan Elastisitas Dan Tax Collection Lags Di Indonesia', *Jurnal Analisa Kebijakan,* 1.1 (2002).

[53] Sutrisno Diah Yuliana, Marhamah, 'Analisis Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2014-2016 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Candisari Kota Semarang)', *Journal of Chemical Information and Modeling,* 53.9 (2017), 97-113.

diproduksi akan turun, hanya akan mampu membeli barang dan jasa murah dalam jumlah kecil. Semakin rendah tingkat konsumsi, semakin rendah penerimaan PPN.[54]

Menurunnya konsumsi masyarakat akan mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai yang dipungut atas barang dan jasa, dan masyarakat akan semakin sedikit membeli barang dan jasa. Menurut Wantara, menjelaskan bahwa besar kecilnya penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Jadi, sebagai persentase dari tingkat inflasi atau tingkat harga, dapat dikatakan bahwa inflasi berdampak negatif terhadap perpajakan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa inflasi juga akan berdampak positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini bisa terjadi karena dengan adanya inflasi, harga komoditas akan naik, yang otomatis akan meningkatkan pemungutan PPN.[55] Penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni menunjukkan, bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sapridawati dkk, bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Nilai tukar atau disebut juga nilai tukar mata uang asing adalah jumlah mata uang domestik yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing..

---

[54] Laily Dwi Yulianingtyas, '*Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III)*' (Universitas Brawijaya, 2018).

[55] Eddi Wahyudi., dkk., 'Dampak Fluktuasi Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak', *Jurnal Ekonomi IPB*, 6.1 (2009).

D. Nilai Tukar Rupiah

1. Pengertian Nilai Tukar Rupiah

Menurut Murni, nilai tukar atau disebut juga nilai tukar mata uang asing adalah jumlah mata uang domestik yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.[56] Jadi, nilai tukar adalah nilai di mana suatu mata uang tertentu digunakan untuk memperoleh satuan mata uang tertentu sebagai patokan pada waktu tertentu, dan ditetapkan oleh Bank Sentral suatu negara bersangkutan. Nilai tukar terhadap dollar AS ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan pasar, atau nilai tukar rupiah Indonesia ditentukan oleh mekanisme pasar. Jika harga rupiah melemah terhadap dollar, permintaan dollar akan meningkat. Sebab, investor cenderung melepas rupiah dan membeli dollar. Secara umum, nilai tukar ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran mata uang asing.[57]

2. Permintaan dan Penawaran Terhadap Mata Uang Asing

Ketika harga mata uang asing rendah, permintaan mata uang asing untuk mata uang domestik meningkat, dan ketika harga mata uang asing tinggi untuk mata uang domestik, permintaan mata uang asing untuk mata uang domestik menurun dan rendah. Faktor yang dapat mempengaruhi permintaan valas, adalah kegiatan impor, perubahan selera konsumsi

---

[56] Asfia Murni, *Ekonomika Makro* (Jakarta: PT Refika Aditama, 2006), hal. 244.

[57] Dwi Nuraeni, '*Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

masyarakat, harga valas, tingkat pendapatan masyarakat, perubahan suku bunga, dan inflasi domestic

Ketika harga mata uang asing tinggi, penawaran mata uang asing ke mata uang domestik meningkat, dan ketika harga mata uang asing rendah, penawaran mata uang asing ke mata uang domestik menurun. Faktor lain yang mempengaruhi penawaran valas, adalah: kegiatan ekspor, harga domestik yang murah, dan investasi dan suku bunga tinggi di Negara tersebut.

3. Sistem Nilai Tukar

Menurut Triyono, terdapat berbagai jenis sistem nilai tukar yang digunakan oleh suatu negara, antara lain:

a. Sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar, dengan atau tanpa intervensi pemerintah melalui kebijakan moneter untuk upaya stabilisasi, jika ada intervensi pemerintah, sistem tersebut termasuk dalam kisaran mengambang terkendali.
b. Sistem nilai tukar tetap adalah ketika suatu negara menetapkan dan menyatakan nilai tukar tertentu untuk mata uangnya dan mempertahankan nilai tukar tersebut dengan membeli atau menjual mata uang asing dalam jumlah yang tidak terbatas pada nilai tukar tersebut.

4. Macam-Macam Nilai Tukar

Menurut Fischer, ada beberapa istilah mengenai nilai tukar, yaitu:

a. Kurs beli adalah nilai tukar yang digunakan oleh bank atau *money changer* ketika membeli mata uang asing, atau dapat dibandingkan dengan seberapa sering kita akan mengkonversi mata uang asing yang kita miliki ke dalam mata uang domestik. Nilai tukar yang akan digunakan bank jika Anda membeli mata uang asing.
b. Kurs jual adalah nilai tukar yang digunakan bank atau *money changer* saat menjual mata uang asing, atau bisa diibaratkan dengan nilai tukar yang kita gunakan saat menukarkan mata uang domestik kita dengan mata uang asing yang kita inginkan. Nilai tukar yang akan berlaku jika kita menjual dalam mata uang nasional.
c. Kurs tengah adalah nilai tukar tengah antara kurs jual dan kurs beli. Kurs tengah dapat ditentukan dengan menghitung jumlah kurs beli dan kurs jual dibagi dua.

5. Nilai Tukar Rupiah terhadap Perspektif Ekonomi Islam

Praktik nilai tukar hanya terjadi pada kontrak jual beli. Transaksi jual beli adalah praktik muamalah yang dibenarkan oleh Syariah. Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 275 berfiman yang artinya: *"Dan Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba*." Di sisi lain, Allah SWT juga menegaskan bahwa umat Islam tidak diperbolehkan melakukan kegiatan bisnis secara batil. Selanjutnya, dasar diperbolehkannya

pertukaran (jual beli) juga dapat dijelaskan oleh hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al Khudri. juga menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda: *"Janganlah kamu menjual emas dengan emas, kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak yang lain kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."*

Menurut hadits tersebut di atas, dapat dijadikan suatu hukum bahwa transaksi jual beli valas dapat dibenarkan dalam syariah Islam. Hadits tersebut menjelaskan tentang pertukaran barang dagangan, jika barang dagangan itu sejenis (emas dengan emas, perak dengan perak), maka pertukarannya harus dilakukan secara seimbang. Dalam norma hukum Islam, praktik jual beli valuta asing (*al-sharf*) diperbolehkan secara tunai atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada penambahan antar barang yang sejenis.[58]

Berdasarkan aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi pertukaran/jual beli mata uang (valas) diperbolehkan, jika jenis mata uangnya sama dilakukan secara tunai dan tanpa melebih-lebihkan nilai antara satu mata uang dengan mata uang yang akan ditukarkan. Sementara itu, untuk penukaran mata uang yang berbeda jenisnya (valas), seperti emas ke perak atau ke mata uang tunai, seperti rupiah Indonesia ke dollar

[58] Khotibul Umam, 'Jual Beli Valuta Asing Dalam Ekonomi Islam', *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 4.2 (2020), 18–35.

AS dan sebaliknya dapat ditukar sesuai dengan harga pasar, dengan syarat harus tunai (spot), maka hukumnya juga mubah apabila sama nilainya dimana tidak ada syarat untuk meminta kelebihan dalam pertukarannya, tetapi hanya dipersyaratkan adanya pembayaran tunai yang diikuti oleh serah terima barang (valas).[59]

6. Hubungan Nilai Tukar Rupiah dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Nilai tukar atau nilai tukar mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Kementerian Keuangan RI menyampaikan bahwa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi seperti investasi, ekspor, dan konsumsi domestik. Konsumsi domestik secara otomatis terkait dengan penerimaan PPN. Jika rupiah melemah terhadap dollar AS, harga barang konsumsi domestik terutama barang impor, akan naik sementara pendapatan masyarakat tidak berubah. Ketika nilai tukar rupiah melemah, harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat akan naik. Kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat umumnya mempengaruhi penerimaan PPN.[60]

Salah satu potensi penerimaan pajak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita masyarakat dan nilainya tergantung pada kondisi

---

[59] *Ibid*.,

[60] Laily Dwi Yulianingtyas, '*Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III)*' (Universitas Brawijaya, 2018).

makro ekonomi, salah satu indikator yang dapat dilihat adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Kenaikan atau penurunan pendapatan wajib pajak karena fluktuasi nilai tukar mata uang akan mempengaruhi penerimaan PPN. Devaluasi rupiah yang terjadi mempengaruhi penerimaan pajak, dilihat dari ekspor yang tinggi sehingga konversi ke rupiah juga tinggi yang akan meningkatkan penerimaan PPN, sebaliknya jika impor tinggi maka pengembaliannya tinggi yang akan mengurangi penerimaan PPN.[61]

E. Kajian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Hany Ayu Rahma Maulidya, Maslichah, Abdul Wahid Mahsuni / 2021 / Jurnal E-JRA, Vol. 10, No. 08	Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada DJP Jawa Timur III	Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jumlah Pengusaha Kena Pajak secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Penerimaan Pajak

[61] Saefi Nurfajriani, '*Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah, Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Tegal*' (Universitas Pancasakti Tegal, 2019).

			Pertambahan Nilai.
2	Yeni Sapridawati, Novita Indrawati, Azhari Sofyan, Zirman / 2021 / e-journal.uinsuska.ac.id, Vol. 2, No. 1	Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, karena tujuan penelitian ini adalah meneliti hubungan sebab akibat antara dua variabel, yaitu variabel independen (inflasi dan nilai tukar rupiah) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). Penelitian ini dilakukan di Kantor KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Hasil penelitiannya ialah inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Semakin tinggi inflasi dan nilai tukar rupiah maka penerimaan juga akan semakin tinggi.
3	Nur Fitri, Junaiddin Zakaria, Aryati Arfah / 2020 / Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 3, No. 1	Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Makassar	Suku bunga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang memberikan arti bahwa masyarakat di Kota Makassar mengambil banyak peran dalam berinvestasi sehingga perubahan suku bunga tidak mempengaruhi minat kebanyakan masyarakat di Kota Makassar dalam berinvestasi dan Nilai koefisien regresi untuk tingkat inflasi sebesar 0,321 dan menunjukkan arah negatif dan tidak signifikan yang mengandung arti bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak. Nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di kota Makassar dan

			suku bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak di Kota Makassar.
4	Febrina Fitriani Situmeang / 2019 / Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan	Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam	Variabel Jumlah PKP secara parsial berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Variabel Tingkat Inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Lubuk Pakam. Variabel nilai tukar rupiah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Variabel Jumlah PKP, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
5	Saefi Nurfajriani / 2019 / Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal	Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Tegal	Inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Demikian juga dengan pengaruh secara parsial pada alpha 5% menunjukkan hasil yang sama. Selanjutnya berdasarkan *Adjusted R Square* dapat diketahui bahwa pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP dapat dijelaskan sebesar 36,8%

6	Sherly Avelina / 2019 / Skripsi, STIE Eka Prasetya Medan	Pengaruh Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Mata Uang terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	Nilai tukar mata uang berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai impor pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur berdasarkan hasil uji secara parsial. Tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai impor pada KPP Medan Timur berdasarkan hasil uji secara simultan. Hasil penelitian ini didukung oleh nilai R Square (R2) adalah sebesar 0.534 berarti tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang dapat menjelaskan penerimaan pajak pertambahan nilai impor sebesar 53,4% dan sisanya 46,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini seperti jumlah pengusaha kena pajak dan pertumbuhan ekonomi.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konstelasi hubungan antar variabel penelitian. Dalam menyusun kerangka pemikiran, penyajiannya dimulai dari variabel yang mewakili masalah penelitian.[62] Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa dan mengetahui

[62] Widodo, *Metodologi Penelitian: Populer & Praktis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 52-53.

pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat. Adapun yang menjadi variabel pada penelitian ini adalah pengaruh pertumbuhan ekonomi (X_1), inflasi sebagai variabel (X_2), nilai tukar rupiah sebagai variabel (X_3), dan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai variabel (Y) maka kerangka pimikiran atau berfikir dalam penelitian ini guna mempermudah pemahaman penelitian ini maka dapat digambarkan sebagai berikut:

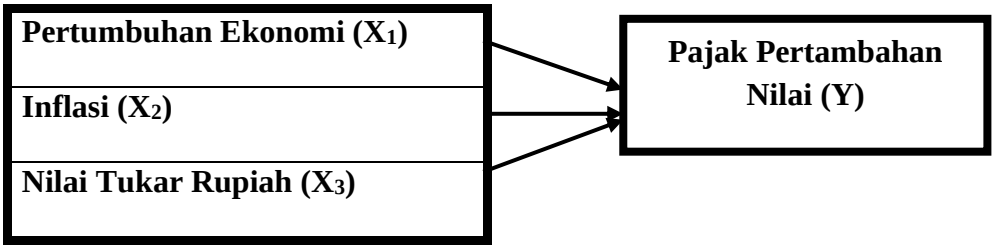

G. Hipotesis

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, hipotesis sangat diperlukan. Hipotesis adalah dugaan yang bersifat sementara yang masih memerlukan pembuktian. Karena ia merupakan dugaan, maka hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk pernyataan dan sinkron dengan rumusan masalah. Pembuktian yang ingin dicapai oleh hipotesis adalah sebagai upaya untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.[63]

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas, penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran objektif tentang pengaruh pertumbuhan

[63]*Ibid*., hal. 58.

ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat, sehingga hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. H_1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di kanwil DJP Sumatera Barat.
2. H_2: Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di kanwil DJP Sumatera Barat.
3. H_3: Nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di kanwil DJP Sumatera Barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, metode yang digunakan, tingkat eksplanasi, dan berdasarkan jenis data yang digunakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data berbentuk numerik/angka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu deskriptif, komparatif, dan korelasional.[64]

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian korelasional/asosiatif. Penelitian korelasional adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh satu atau lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen. Jenis korelasi ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu hubungan simentris, kausal, dan resiprokal. Jenis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal, yang merupakan hubungan sebab akibat.[65] Dimana dalam penelitian ini meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Barat.

---

[64] Suryani & Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 113-114.

[65] *Ibid*., hal. 119-120.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat atau kancah yang dijadikan objek penelitian. Sedangkan waktu penelitian merujuk pada jadwal penelitian, dari tahap penyusunan proposal sampai penulisan laporan penelitian, yang dinyatakan dalam rentang waktu. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2016-2021, waktu penelitian ini pada tahun 2022. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dana dan tenaga dari penulis.

C. Jenis dan Sumber Data

Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam suatu sampel (populasi). Semua data yang ada pada dasarnya merupakan cerminan dari variabel-variabel yang diukur menurut klasifikasinya. Data dapat diklasifikasikan menurut berbagai kriteria, seperti jenisnya, sifat, sumbernya, metode perolehannya, dan waktu pengumpulannya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka (*metric*).[66]

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari

[66] *Ibid*., hal. 170.

berbagai sumber, antara lain: Badan Pusat Statistik (BPS), tersedia melalui website: http://www.bps.go.id. ; Bank Indonesia, tersedia melalui situs web http://www.bi.go.id.; dan situs web yang aktif membahas masalah ekonomi dan yang berkaitan dengan hal tersebut. Menurut waktu pengumpulannya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berkala (*time series*). Data *time series,* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan kegiatan selama periode pengamatan tertentu.[67] Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Barat periode 2016-2021.

D. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.[68] Populasi dalam penelitian ini, yaitu data pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah dan penerimaan pajak pertambahan nilai di Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2016-2021 yang diambil setiap bulan berjumlah 72 pengamatan.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi tersebut. Peneliti akan menggunakan sampel dari populasi

[67] *Ibid*., hal. 171-172
[68] *Ibid*., hal. 190.

tersebut sebagai objek/subjek penelitian.[69] Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, dimana sampel dipilih dengan menggunakan seluruh anggota populasi untuk dijadikan sampel. Data penelitian ini berupa *time series* dari tahun 2016-2021, dengan data bulanan dan jumlah sampel sebanyak 72 pengamatan.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah kegiatan mengukur variabel penelitian dalam hal karakteristik tertentu yang tercermin dalam dimensi atau indikator variabel penelitian.[70] Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini dapat diukur dengan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat tahun 2016-2021. Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini, yaitu penerimaan PPN yang dilambangkan dengan Y.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas setiap nilai tambah barang atau jasa yang beredar dari produsen ke

[69] Bambang Sudaryana, *Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 48.

[70] Widodo, *Op. Cit.*, hal. 82.

konsumen.[71] Data penerimaan PPN yang digunakan adalah data PPN di Sumatera Barat per bulan dari tahun 2016-2021 yang diperoleh dari kantor Direktorat Jenderal Pajak. PPN yang terutang dihitung dengan cara:

PPN yang terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

2. Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pertumbuhan Ekonomi (X_1)

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses di mana situasi perekonomian suatu Negara terus berubah ke keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu atau juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Data pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu PDRB atas harga konstan tahun 2000, dimana PDRB awal dibagi PDRB tahun sebelumnya dibagi 100%, hasilnya dinyatakan dalam persen. Data pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat per bulan sepanjang tahun 2016-2021. Data ini diperoleh dalam bentuk persentase dari Badan Pusat Statistik (BPS).

[71] Chairil Anwar Pohan, *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep, Dan Aplikasi PPN* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 22.

b. Inflasi (X_2)

Inflasi adalah kenaikan harga komoditas secara umum dan berkelanjutan dari satu periode ke periode lainnya.[72] Data inflasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tingkat inflasi di Sumatera Barat per bulan dari tahun 2016-2021. Data ini diperoleh dalam bentuk persentase dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Murni, laju nflasi adalah rasio tingkat harga keseluruhan setiap tahun, biasanya disertai dengan kenaikan harga pada tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) atau (*consumer price index*-CPI) mengukur biaya sekumpulan barang dan jasa di pasar. Laju atau tingkat inflasi dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$Laju\ Inflasi = \frac{\text{IHKt} - \text{IHK (t} - 1)}{\text{IHK (t} - 1)} \text{ x } 100\%$$

Keterangan:

IHKt = Indeks Harga Konsumen tahun x

IHK (t-1) = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya

c. Nilai Tukar Rupiah (X_3)

Nilai tukar rupiah adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.[73]

---

[72] Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2010), hal. 359.

[73] Alif Aldiat Pahala dan Muhammad Muslih, 'Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada DJP Kanwil I Jawa Barat Bandung Tahun 2015-2018)', *E-Proceeding of Management*, 7.2 (2020), 3083–90.

Data nilai tukar yang digunakan adalah data nilai tukar rupiah terhadap US Dollar per bulan dari tahun 2016-2021 yang diambil dari website Bank Indonesia dalam satuan rupiah. Penelitian ini menggunakan data nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat karena merupakan mata uang Internasional yang disepakati negara-negara di dunia.

Menurut Mankiw, kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara, sedangkan kurs riil adalah harga relatif dari barang-barang diantara dua negara.[74] Rumus untuk menghitung kurs riil terdiri dari kurs riil untuk barang tunggal dan kurs riil untuk kelompok barang yang lebih luas:

1) Kurs riil untuk barang tunggal

$$Kurs\ Riil = \frac{\text{Kurs Nominal x Harga Barang Domestik}}{\text{Harga Barang Luar Negeri}}$$

2) Kurs riil untuk kelompok barang yang lebih luas

$$€ = e \times (P/P^*)$$

3) Kurs Nominal

$$e = € \times (P^*/P)$$

Keterangan:

€ = Kurs Riil
e = Kurs Nominal
P/P* = Rasio Tingkat Harga
P = Tingkat Harga Luar Negeri (Dollar)
P* = Tingkat Harga Domestik

[74] Mankiw, *Op. Cit.*, hal. 128-135.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berhubungan dengan aspek yang diteliti.[75] Dalam penelitian ini peneliti mencari data pajak pertambahan nilai yang diperoleh dari website DJP Sumatera Barat tahun 2016-2021. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang diperoleh dari BPS tahun 2016-2021. Nilai tukar rupiah yang diperoleh dari BI tahun 2016-2021.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature baik buku, jurnal, majalah, Koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.[76] Dalam penelitian ini peneliti mempelajari, mengutip teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

---

[75] Widodo, *Op. Cit.*, hal. 75.
[76] *Ibid*.,

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian. Analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang telah diajukan.[77] Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, adalah statistik inferensial, yaitu statistika yang berkaitan dengan bagaimana kesimpulan diambil dari data yang diperoleh dari suatu sampel untuk menggambarkan suatu ciri atau karakteristik dari suatu populasi.[78] Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, yaitu suatu metode untuk menemukan pola hubungan antara variabel dependen (terikat) dengan variabel independen (bebas).[79] Peneliti akan melakukan pengolahan data menggunakan program statistik untuk mengolah data menggunakan program SPSS Versi 26 dan Microsoft Excel 2007.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi residual. Model yang baik mempunyai residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas menggunakan uji normal *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika

[77] Suryani, hal, 210.

[78] M. Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Untuk: Ekonomi, Manajemen, Komunikasi, Dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hal. 293.

[79] Andhita Dessy Wulansari, *Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2017), hal. 120-122

tingkat signifikansi atau (sig) > a (0,05) maka distribusi data normal dan begitu pula sebaliknya.[80]

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan linier antara satu variabel bebas (independen) dengan variabel bebas lainnya. Kemudian ada dua atau lebih variabel bebas (independen) yang diperkirakan akan mempengaruhi variabel terikat (dependen). Pendugaan ini masuk akal jika tidak terjadi adanya hubungan yang linier (multikolinearitas) diantara variabel-variabel independen. Salah satu uji multikolinieritas yang umum digunakan adalah uji *Variance Inflation Faktor* (VIF). [81]

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. Jika asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi, maka penduga menjadi tidak efektif baik pada sampel kecil maupun besar dan penduga koefisien dapat dikatakan kurang akurat.[82] Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji statistik yaitu uji Glejser. Uji glejser yaitu menyarankan untuk regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen, dengan asumsi nilai sig. > 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas.

---

[80] Widodo, *Op. Cit.*, hal. 111.

[81] Tedi Rusman, *Statistika Penelitian: Aplikasinya Dengan SPSS* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal. 59

[82] *Ibid*., hal. 63.

d. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara data yang diamati atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson (DW-test*) untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi. Jika nilai statistik *Durbin-Waston* berada diantara angka 2 atau mendekati angka 2, maka data yang diamati dapat dikatakan tidak terjadinya autokorelasi, jika sebaliknya maka dinyatakan terdapat autokorelasi.[83]

2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah prosedur yang digunakan untuk menguji diterima atau tidaknya hasil hipotesis (H_0) dari suatu sampel. Keputusan untuk mengolah H_0 didasarkan pada nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada.[84]

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara satu variabel terikat (dependen) dengan lebih dari satu variabel bebas (independen)[85] yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi (X_1), inflasi (X_2), dan nilai tukar rupiah (X_3) dan variabel terikatnya adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Barat (Y). Peneliti menggunakan analisis ini untuk memprediksi nilai

[83] *Ibid*., hal. 62

[84] Gujarati, *Ekonometrika Dasar* (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 82-83

[85] Andhita Dessy Wulansari, *Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian*, hal. 145-148.

variabel terikat jika nilai variabel bebas meningkat atau menurun dan untuk menentukan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah masing-masing variabel bebas berkorelasi positif atau negatif. Analisis regresi linier berganda ini menggunakan software SPSS dengan persamaan regresi :

$$\mathbf{Y= \alpha+ \beta_1 X_1 +\beta_2 X_2 +\beta_3 X_3 + e}$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen (Penerimaan PPN)

α = Konstanta

β = Koefisien

X_1 = Variabel Independen (Pertumbuhan Ekonomi)

X_2 = Variabel Independen (Inflasi)

X_3 = Variabel Independen (Nilai Tukar Rupiah)

e = Variabel Pengganggu (*error*)

b. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (t-test)

Tujuan dari uji t adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.[86] Terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam pengujian ini, yaitu:

1) Menggunakan pengaruh dan tingkat signifikansi α = 0,05 atau 5%.

[86] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21*, hal. 98.

2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
3) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

c. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh semua variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.[87]

Dasar pengambilan keputusan dalam uji F menggunakan kriteria sebagai berikut:

1) Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
2) Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai signifikansi > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama atau simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.[88]

[87] Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hal. 303.
[88] *Ibid*., hal. 333-334

d. Uji Koefisien R *Square* (R^2)

Tujuan uji R^2 dilakukan adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase (%) pengaruh semua variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Jika hasil regresi pada koefisien determinasi (R^2) mendekati 1, maka model regresi yang digunakan semakin kuat sebagai penduga terhadap variabel dependen.[89]

Koefisien determinasi memilki nilai antara 0-1. Nilai R^2 yang kecil berarti variabel independen memiliki kemampuan yang terbatas untuk menjelaskan perubahan variabel dependen. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan variabel dependen.[90]

[89] Gujarati, *Ekonometrika Dasar,* hal. 82-83

[90] Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21*, hal. 97

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi

Sebelum lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, wilayah Sumatera Barat merupakan bagian dari Kanwil DJP Sumatera bagian tengah, yang berkedudukan di Pekanbaru. Wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera bagian tengah meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau. Lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 selain melakukan penataan organisasi dan tata kerja instansi vertical di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, juga melaksanakan modernisasi system administrasi perpajakan.

Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mulai beroperasi pada tahun 2007 berkedudukan di Jalan M Husni Thamrin Nomor 18, Kompleks Mall Kapuk, Jambi. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi berubah struktur organisasi menjadi kantor wilayah

modern sejak tanggal 9 September 2008 dan berpindah kedudukan di Jalan Pemuda Nomor 49, Padang. Wilayah kerjanya saat itu terdiri dari daerah administrasi pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan Jambi, dengan 8 (delapan) KPP Pratama dan 19 (sembilan belas) KP2KP. Kemudian pada tanggal 1 April 2015, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi berpindah alamat ke Jalan Khatib Sulaiman No 53, Padang.

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/ PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 5 Oktober 2015 KPP Pratama Padang dipecah menjadi KPP Pratama Padang Satu dan KPP Padang Dua. Pada tanggal 1 Oktober 2019 KPP Pratama Jambi dipecah menjadi KPP Pratama Jambi Pelayangan dan KPP Pratama Jambi Telanaipura. Dari dua pemekaran kantor tersebut, kini Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi membawahi 10 (sepuluh) KPP Pratama dan 19 (sembilan belas) KP2KP.

Provinsi Sumatera Barat dan Jambi merupakan dua provinsi cakupan wilayah kanwil dengan total luas daerah mencapai 92.904,00 km^2 . Terdapat 10 (sepuluh) Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) dan 19 (sembilan belas) unit setingkat eselon IV berupa Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang berada di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi. Dengan jumlah Wajib Pajak sebesar 1.415.522 Wajib Pajak.

Terdapat 5 (lima) KPP Pratama dan 12 (dua belas) KP2KP di Provinsi Sumatera Barat yaitu KPP Pratama Padang Satu dengan KP2KP Pariaman. KPP Pratama Bukittinggi dengan KP2KP Lubuk Basung, KP2KP Lubuk Sikaping, KP2KP Simpang Ampat. KP2KP Padang Panjang. KPP Pratama Solok dengan KP2KP Kotobaru, KPKP Muaro Sijunjung, KP2KP Padang Aro, KPKP Sawahlunto. KPP Pratama Payakumbuh dengan KPP Mikro Batu Sangkar. KPP Pratama Padang Dua dengan KP2KP Tua Pejat dan Painan.

Terdapat 5 (lima) KPP Pratama dan 7 (tujuh) di Provinsi Jambi, yaitu KPP Pratama Jambi Telanaipura dengan KP2KP Sengeti. KPP Pratama Muara Bungo d engan KP2KP Rimbo Bujang dan Muara Tebo. KPP Pratama Bangko dengan KP2KP Sarolangun dan KP2KP Sungai Penuh. KPP Pratama Kuala Tungkal dengan KP2KP Muara Sabak. Dan KPP Pratama Jambi Pelayangan dengan KP2KP Muara Bulian.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dalam melaksanakan tugasnya, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;

b. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
c. Pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;
d. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
e. Pemberian bimbingan pendataan dan penilaian serta pemberian bimbingan dan pemantauan pengenaan;
f. Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen;
g. Pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan;
h. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
i. Pemberian bimbingan dan pelaksanaaan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan gugatan;
j. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;

k. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia;

l. Pengelolaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah;

m. Pelaksanaan urusan bantuan hukum; dan

n. Pelaksanaan administrasi kantor.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah bagian dari analisis data yang menggambarkan awal dari setiap variabel yang digunakan. Statistik deskriptif dilakukan untuk melihat nilai *minimum, maximum, mean,* dan standar deviasi dari suatu variabel. Hasil uji statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistiks

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln_PertumbuhanEkonomi	72	-2.53	1.77	1.2273	.76397
Ln_Inflasi	72	-3.91	.42	-1.2071	1.00780
Ln_NilaiTukarRupiah	72	9.47	9.67	9.5456	.04200
Ln_PenerimaanPPN	72	24.38	26.67	25.6341	.40774
Valid N (listwise)	72				

Sumber: *Output SPSS*, data sekunder diolah 2022

Output yang ditampilan oleh SPSS pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah pengamatan yang dilakukan dalam penelitian adalah 72 data pengamatan. Berdasarkan output diatas, uji statistik deskriptif dapat diartikan sebagai berikut:

a. Jumlah data (N) pengamatan sebanyak 72 pengamatan.
b. Variabel pertumbuhan ekonomi memilki jumlah data penelitian (N) sebanyak 72, nilai minimum -2,53, nilai maksimum 1,77. Nilai rata-rata 1,2273, dan standar deviasi sebesar 0,76397.
c. Variabel inflasi memilki jumlah data penelitian (N) sebanyak 72, nilai minimum -3,91, nilai maksimum 0,42. Nilai rata-rata -1,2071, dan standard deviasi sebesar 1,00780.
d. Variabel nilai tukar rupiah memilki jumlah data penelitian (N) sebanyak 72, nilai minimum 9,47, nilai maksimum 9,67. Nilai rata-rata 9,5456 dan standar deviasi sebesar 0,04200.
e. Variabel penerimaan PPN memilki jumlah data penelitian (N) sebanyak 72, nilai minimum 24,38, nilai maksimum 26,67. Nilai rata-rata 25,6341 dan standar deviasi sebesar 0,40774.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model

regresi yang memiliki data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan melalui dua cara yaitu dengan melihat grafik histogram dan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik *Normal Probability Plot*. Adapun hasil uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas menggunakan Grafik Histogram

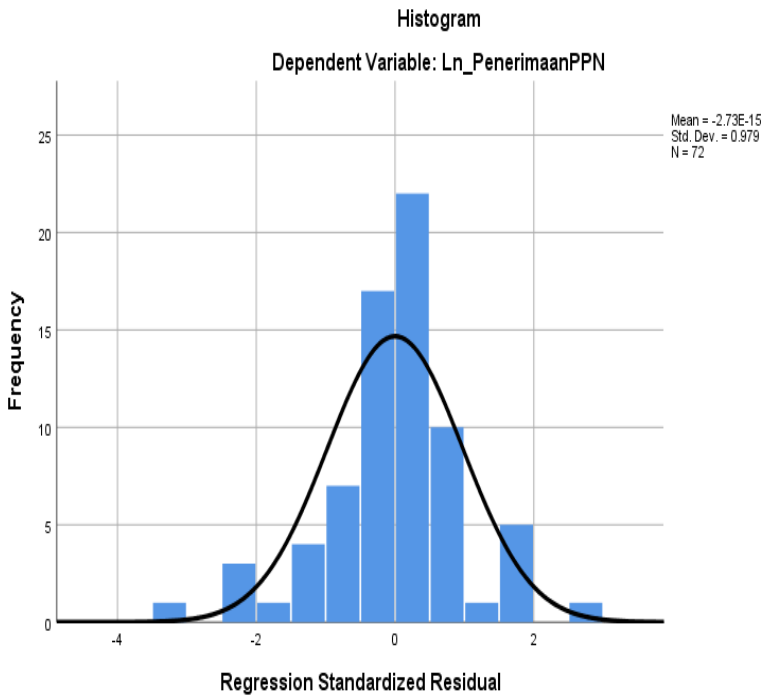

Sumber: Data sekunder yang diolah

Gambar 4.2

Grafik *Normal Probability Plot*

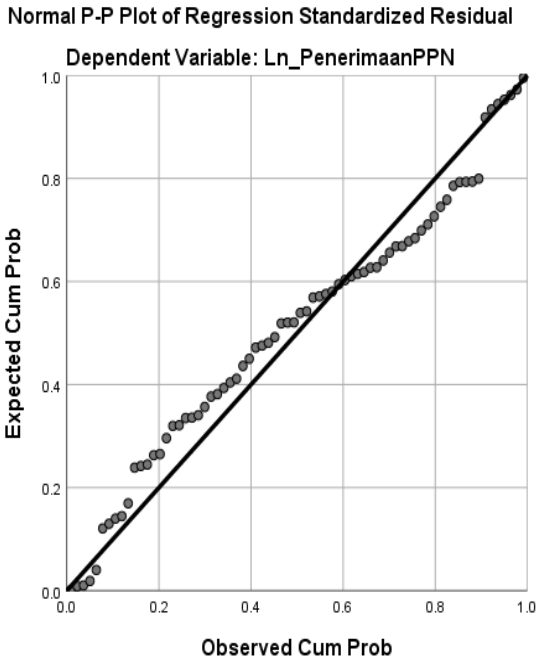

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tampilan grafik histogram dan grafik *Normal Probability Plot* diketahui grafik histogram menampilkan pola distribusi yang normal tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan, sedangkan grafik *Normal Probability Plot* menunjukkan bahwa titik-titik berada di sekitar garis diagonal dan juga bergerak searah dengan garis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diolah dalam penelitian ini sesuai dengan asumsi normalitas/terdistribusi normal.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat interkorelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah model yang variabel bebasnya tidak memiliki hubungan linier yang kuat dengan variabel bebas lainnya. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai yang biasa digunakan untuk mengukur ada tidaknya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* lebih besar atau sama dengan 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* kurang dari 10.

Tabel 4.2

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistiks	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.967	9.718		1.231	.222		
	Ln_PertumbuhanEkonomi	-.249	.056	-.467	-4.449	.000	.983	1.017
	Ln_Inflasi	.026	.042	.065	.628	.532	.998	1.002
	Ln_NilaiTukarRupiah	1.467	1.017	.151	1.442	.154	.985	1.015

a. Dependent Variabel: Ln_PenerimaanPPN

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah memiliki nilai *tolerance* diatas 0,1 dimana masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,983; 0,998; dan 0,985. Sedangkan nilai VIF ketiga variabel bebas tersebut adalah 1,017; 1,002; dan 1,015 atau kurang dari 10. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada semua variabel bebas dalam model regresi pada penelitian ini.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji ketidaksamaan varians dalam model regresi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, disebut homoskedastitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

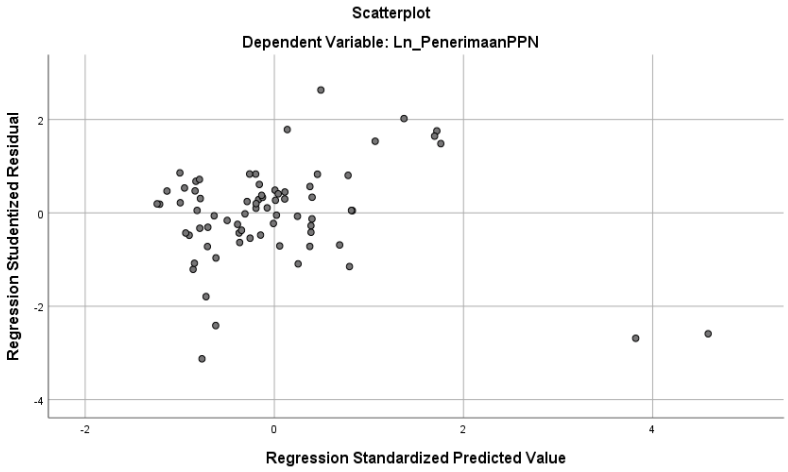

Sumber: Data sekunder yang diolah

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa titik-titik data terdistribusi secara acak dan tidak membentuk sebuah pola baik diatas atau dibawah angka 0 pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji asumsi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri, artinya nilai variabel dependen tidak tergantung dengan nilai variabel itu sendiri, baik itu nilai periode sebelumnya maupun nilai periode setelahnya. Berdasarkan ketentuan uji autokorelasi, jika angka D-W lebih kecil -2 maka ada autokorelasi positif, jika angka D-W diantara -2 sampai +2 maka tidak terjadi autokorelasi, dan jika angka D-W lebih besar +2, terdapat autokorelasi negatif.

Tabel. 4.3

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.514[a]	.265	.232	.35729	1.197

a. Predictors: (Constant), Ln_NilaiTukarRupiah, Ln_Inflasi, Ln_PertumbuhanEkonomi

b. Dependent Variabel: Ln_PenerimaanPPN

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,197, diantara -2 sampai +2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

3. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda, yang akan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN. Adapun hasil regresi linier berganda yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistiks	
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.967	9.718		1.231	.222		
	Ln_PertumbuhanEkonomi	-.249	.056	-.467	-4.449	.000	.983	1.017
	Ln_Inflasi	.026	.042	.065	.628	.532	.998	1.002
	Ln_NilaiTukarRupiah	1.467	1.017	.151	1.442	.154	.985	1.015

a. Dependent Variabel: Ln_PenerimaanPPN

Sumber: Data sekunder yang diolah

Seperti terlihat pada tabel 4.4 diatas, hasil analisis regresi variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$Y= \alpha+ \beta_1X_1 +\beta_2X_2 +\beta_3X_3 + e$

$Y = 11{,}967 – 0{,}249X_1 + 0{,}026X_2 + 1{,}467X_3$

Persamaan regresi berganda diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Konstanta α bernilai positif sebesar 11,967 menunjukkan bahwa jika variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah diasumsikan bernilai 0, maka penerimaan PPN akan bernilai positif atau meningkat sebesar 11,967.
2) Nilai koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan ekonomi (X1) adalah sebesar -0,249. Artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka penerimaan PPN akan menurun dengan asumsi variabel inflasi dan nilai tukar rupiah tetap atau konstan.
3) Nilai koefisien regresi untuk variabel inflasi (X2) sebesar 0,026. Artinya jika nilai inflasi meningkat maka penerimaan PPN juga akan meningkat, dengan asumsi variabel pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah adalah tetap.
4) Nilai koefisien untuk variabel nilai tukar rupiah (X3) sebesar 1,467. Artinya jika nilai tukar rupiah meningkat maka penerimaan PPN juga akan meningkat, dengan asumsi variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi tetap atau konstan.

b. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah) dapat menjelaskan variabel dependen (penerimaan PPN). Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, jika nilainya mendekati 1 maka hubungan semakin kuat dan jika nilainya mendekati 0 maka hubungan semakin lemah.

Tabel 4.5

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.514[a]	.265	.232	.35729	1.197

a. Predictors: (Constant), Ln_NilaiTukarRupiah, Ln_Inflasi, Ln_PertumbuhanEkonomi

b. Dependent Variabel: Ln_PenerimaanPPN

Sumber: Data sekunder yang diolah

Output SPSS pada tabel 4.6 diatas, menunjukkan nilai koefisien *R Square* sebesar 0,265 atau sebesar 26,5%. Hal ini menunjukkan kontribusi variabel independen (pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN) adalah sebesar 26,5%, sedangkan sisanya yaitu (100% - 26,5% = 73,5%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar variabel.

c. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Tujuan uji statistik F atau *Analysis of Variance* (ANOVA) adalah untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen memiliki

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05, dan jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05, maka model regresi tersebut signifikan secara statistik dan layak untuk digunakan. Hasil uji F untuk pengujian ini adalah, sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.123	3	1.041	8.156	.000[b]
	Residual	8.681	68	.128		
	Total	11.804	71			

a. Dependent Variabel: Ln_PenerimaanPPN
b. Predictors: (Constant), Ln_NilaiTukarRupiah, Ln_Inflasi, Ln_PertumbuhanEkonomi
Sumber: Data sekunder yang diolah

Nilai df1=k-1, =4-1=3, nilai df2=n-k=72-4=68. F_{tabel} yang diperoleh adalah 2,74. Hasil uji F pada tabel 4.5 diatas, didapat F_{hitung} sebesar 8,156 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). $F_{hitung} > F_{tabel}$ (8,156 > 2,74) dan tingkat signifikansinya 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

d. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Tujuan dilakukan uji statistik t adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Dengan tingkat signifikansi = 0,05 dan derajat kebebasan (df) = n-k-1, dimana n=jumlah sampel, k=jumlah variabel bebas, diperoleh df = 68 (72-3-1). Dengan df = 68 maka nilai t_{tabel} adalah 1,995. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima. Hasil statistik uji t dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Statistik Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	11.967	9.718		1.231	.222
	Ln_Pertumbuhan Ekonomi	-.249	.056	-.467	-4.449	.000
	Ln_Inflasi	.026	.042	.065	.628	.532
	Ln_NilaiTukarRupiah	1.467	1.017	.151	1.442	.154

a. Dependent Variabel: Ln_PenerimaanPPN

Sumber: Data sekunder yang diolah

Hasil pengujian hipotesis:

1) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, tingkat signifikansi variabel pertumbuhan

ekonomi sebesar 0,000 atau (0,000 < 0,05), menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima.

2) Pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, tingkat signifikansi variabel inflasi sebesar 0,532 atau (0,532 > 0,05), menunjukkan bahwa variabel inflasi (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, sehingga hipotesis kedua (H_2) ditolak.
3) Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, tingkat signifikansi variabel nilai tukar rupiah sebesar 0,154 atau (0,154 > 0,05), menunjukkan bahwa variabel nilai tukar rupiah (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan PPN

Hasil uji t pada tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 4,449 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Nilai t_{tabel} sebesar 1,995 sehingga dapat diketahui bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel}, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan

terhadap penerimaan PPN di Sumatera Barat sehingga hipotesis H_1 diterima.

Menurut Arsyid dalam Nasrulloh, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan terus meningkat akan memberikan kontribusi pada penerimaan PPN karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan menjamin terus terjadinya konsumsi barang dan jasa kena pajak di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN.[91]

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putu Vilia Pusphita dan Ni Luh Supadmi yang menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 22,501 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang

[91] Iin Rofikayanti, '*Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pendapatan Perkapita Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru Terhadap Penerimaan PPN Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru*' (UIN Sultan Syarif Kasim, 2017).

menunjukkan pengaruhnya positif dan signifikan.[92] Dan didukung juga oleh penelitian Dewa Made Arta Wijaya yang menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di Bali, dibuktikan dengan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung = 3,716 > ttabel = 2,048 sehingga H_1 diterima.[93]

Hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saefi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

2. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPN

Hasil uji t pada tabel 4.7 diatas, didapat t_{hitung} untuk variabel inflasi sebesar 0,628 dengan tingkat signifikan sebesar 0,532 (lebih besar dari 0,05). Nilai t_{tabel} sebesar 1,995 sehingga dapat diketahui bahwa t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} (0,628 < 1,995). Oleh karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel}, maka dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN, sehingga hipotesis H_2 ditolak dalam penelitian ini.

[92] Putu Vilia Puspitha and Ni Luh Supadmi, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Pada Penerimaan PPN (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Se-Bali)', *Jurnal Akuntansi*, 22 (2018), 1530–56.

[93]Dewa Made Arta Wijaya, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Inflasi Regional Terhadap Ppn Dn Di Bali', *E-Jurnal Akuntansi*, 2.2 (2013), 368–77.

Inflasi merupakan gejala yang menunjukkan tingkat harga naik secara umum yang berlangsung secara terus-menerus. Jika kenaikan harga bersifat sementara, maka tidak dapat dikatakan inflasi. Dengan kenaikan harga umum, ini berarti bahwa semua unit ekonomi baik konsumen ataupun produsen akan membeli barang dalam jumlah yang lebih sedikit dengan pengeluaran rupiah yang tetap sama.[94] Jika inflasi tinggi, maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan naik karena terjadi peningkatan harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak PPN. Jika inflasi rendah, maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan turun karena penurunan harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak PPN.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat inflasi meningkat atau menurun belum tentu mengurangi daya beli masyarakat dan tingkat inflasi tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam kondisi inflasi tinggi pemerintah membuat kebijakan untuk penanganan inflasi sehingga kenaikan inflasi tidak terlalu mempengaruhi aktivitas perekonomian. Hal yang menyebabkan tidak terdapat pengaruh antara inflasi dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tidak bergantung pada tingkat inflasi di Sumatera Barat pada tahun 2016-2021 yang dikarenakan tingkat inflasi yang naik ataupun turun tidak mempengaruhi harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak.

[94] Saefi Nurfajriani, '*Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah, Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Tegal*' (Universitas Pancasakti Tegal, 2019).

Jika inflasi tinggi, maka penerimaan PPN di Sumatera Barat akan tetap karena tidak terjadi peningkatan harga jual. Jika inflasi rendah, maka penerimaan PPN di Sumatera Barat akan tetap juga karena tidak terjadi penurunan harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tongam Sinambela dan Suci Rahmawati yang menyatakan, bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN, dibuktikan dengan nilai signifikannya adalah sebesar 0,842 lebih besar dari 0,05 sehingga H_1 ditolak.[95] Didukung juga dengan penelitian Febrina Fitriani Situmeang yang menyatakan, bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN, dibuktikan dari nilai signifikan sebesar 0,477>0,05 dan nilai t_{hitung} = -0,720 < t_{tabel} = 2,0369 yang berarti hubungannya adalah negatif.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Renata, Hidayat dan Kaniskha, yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal yang sama dengan penelitian Sapridawati, Indrawati, Sofyan, dan Zirman, yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

3. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN

Hasil uji t pada tabel 4.7 diatas, diperoleh t_{hitung} untuk variabel nilai tukar rupiah sebesar 1,442 dengan tingkat signifikan sebesar 0,154 (lebih

[95] Tongam Suci Rahmawati Sinambela, 'Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai', *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5.1 (2019), 83–97.

besar dari 0,05). Nilai t_{tabel} sebesar 1,995, sehingga dapat diketahui bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} (1,442 < 1,995). Oleh karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 dan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel}, maka dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar rupiah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga hipotesis H_3 ditolak dalam penelitian ini.

Nilai tukar adalah jumlah mata uang domestik yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap mata uang asing atau terjadi depresiasi akan menyebabkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat mengalami kenaikan. Hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa naik sedangkan tingkat pendapatan masyarakat cenderung konstan atau tetap. Daya beli atau konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena PPN merupakan pajak atas konsumsi. [96] Ketika nilai tukar rupiah melemah, sektor industri yang bergantung kepada impor bahan baku dan barang modal akan mengalami pengurangan hasil produksi dikarenakan mahalnya biaya produksi. Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terjadi pada kegiatan ekspor impor oleh perusahaan dalam wilayah pabean.

[96] Margareth Juniarti Songdala, '*Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015-2017*' (Universitas Brawijaya, 2018).

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan penghasilan masyarakat akibat fluktuasi kurs mata uang tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Barat. Terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar tidak akan mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Barat dilihat dari ekspor yang tinggi sehingga konversi ke rupiahnya pun tinggi, maka tidak menambah penerimaan PPN, penerimaan PPN akan tetap stabil. Jika impor tinggi, maka restitusinya tinggi juga tidak akan mengurangi penerimaan PPN, penerimaan PPN akan tetap stabil. Jika semakin kuat kurs rupiah terhadap Dollar (terapresiasi) maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan tetap. Jika kurs rupiah melemah terhadap dollar (depresiasi) maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga akan tetap, tidak meningkatkan atau menurunkan penerimaan PPN. Hal ini dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang akan diperoleh di Sumatera Barat.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Caesa Pranata N dan Sugeng Santoso yang menyatakan, bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN, dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar 0,531 dengan tingkat signifikan 0,599 (lebih besar dari 0,05). Nilai t_{hitung} = 0,531 < t_{tabel} =

2,2035 sehingga Ha_2 ditolak.[97] Dan didukung juga oleh penelitian yang dilakukan Hany Ayu Rahma Maulidya, dkk yang menyatakan, bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, dibuktikan dengan tingkat signifikannya 0,866 (lebih besar dari 0,05).

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sapridawati, dkk yang menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh penelitian Diah Yuliana, dkk yang menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

[97] Caesa Pranata N dan Sugeng Santoso, 'Analisis Pengaruh Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar Amerika Terhadap Penerimaan PPN (Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa Tengah II)', *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 16.2 (2018), 9–12.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis secara parsial pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN, menunjukkan t_{hitung} variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 4,449 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Nilai t_{tabel} sebesar 1,995 sehingga dapat diketahui bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (4,449 > 1,995). Oleh karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel}, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN di Sumatera Barat sehingga hipotesis H_1 diterima.
2. Analisis secara parsial pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN, didapat t_{hitung} variabel inflasi sebesar 0,628 dengan tingkat signifikan sebesar 0,532 (lebih besar dari 0,05). Nilai t_{tabel} sebesar 1,995 sehingga dapat diketahui bahwa t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} (0,628 < 1,995). Oleh karena tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 dan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel}, maka dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga hipotesis H_2 ditolak.

3. Analisis secara parsial pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN menujukkan t_{hitung} variabel nilai tukar rupiah sebesar 1,442 dengan tingkat signifikan sebesar 0,154 (lebih besar dari 0,05). Nilai t_{tabel} sebesar 1,995, sehingga dapat diketahui bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} (1,442 < 1,995). Oleh karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 dan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel}, maka dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar rupiah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga hipotesis H_3 ditolak.
4. Analisis secara simultan melalui uji F didapat F_{hitung} sebesar 8,156 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai F_{tabel} adalah 2,74. Apabila F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} maka diketahui bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} (8,156 > 2,74). Tingkat signifikansi pada uji F juga lebih kecil dari tingkat signifikansi yang dipakai 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, dari hasil hipotesis penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi pemerintah disarankan agar dapat mengeluarkan kebijakan untuk terus mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga keserasian antara pertumbuhan jumlah penduduk, harga komoditi

secara umum, pertambahan kapasitas produksi, dan tingkat pendapatan. Pemerintah disarankan agar terus menjaga kestabilan tingkat inflasi agar tidak terjadinya kenaikan harga secara signifikan dan akan mempengaruhi keberlangsungan pembangunan suatu Negara karena pendapatan utama di Indonesia adalah dari sektor perpajakan. Pemerintah disarankan agar menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar, dengan cara meningkatkan ekspor barang/jasa keluar negeri sehingga devisa Negara bertambah dan nilai rupiah akan stabil.

2. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, untuk dapat mempertahankan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang rata-rata hampir mendekati target yang direncanakan dengan mengatasi atau minimal mengurangi hambatan-hambatan yang ditemukan selama memungut Pajak Pertambahan Nilai.
3. Bagi mahasiswa yang meneliti selanjutnya, disarankan agar penelitian yang dilakukan lebih mendalam. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lainnya yang lebih mempengaruhi penerimaan PPN, seperti Jumlah Pengusaha Kena Pajak, suka bunga, jumlah penduduk, serta ekspor dan impor. Dan juga dapat menambah tahun penelitiannya agar hasil penelitiannya dapat lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Ma'ruf. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Untuk: Ekonomi, Manajemen, Komunikasi, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Al-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar Dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.

Diah Yuliana, Marhamah, dan Sutrisno. 2017. Analisis Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2014-2016 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Candisari Kota Semarang). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 (9), 89–99.

Falianty, Telisa Aulia. 2019. *Teori Ekonomi Makro Dan Penerapannya Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Fitriani Situmeang, Febrina. 2019. *Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam*. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Gujarati. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.

Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hasyim, Ali Ibrahim. 2016. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kencana.

Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana ES. 2018. *Perpajakan: Teori & Praktik*. Depok: Rajawali Pers.

Huda, Nurul et. al. 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Indriastuti, Ria. 2017. *Pengaruh Pendapatan Perkapita, Inflasi Dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia*. Universitas Diponegoro, Semarang.

Kartini, Sri. 2019. *Mengenal Inflasi*. Semarang: Mutiara Aksara.

Kholis, Nur Kholis. 2010. Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, August, 1–23.

Mankiw, N. Gregory. 2007. *Teori Makro Ekonomi.* Jakarta: Gelora Aksara Pratama.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan: Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.

Murni, Asfia. 2006. *Ekonomika Makro*. Jakarta: PT Refika Aditama.

Neriswad. 2002. Pengaruh Inflasi Terhadap Nilai Riil Penerimaan Pajak Negara: Pendekatan Elastisitas Dan Tax Collection Lags Di Indonesia. *Jurnal Analisa Kebijakan*, 1 (1).

Nuraeni, Dwi. 2011. *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Nurfajriani, Saefi. 2019. *Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah, Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Tegal*. Universitas Pancasakti, Tegal.

Nuryani. 2016. *Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Indonesia*. Universitas Lampung.

Pahala, Alif Aldiat dan Muhammad Muslih. 2020. Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada DJP Kanwil I Jawa Barat Bandung Tahun 2015-2018). *E-Proceeding of Management*, 7 (2), 83–90.

Pangiuk, Ambok. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2 (2), 44 <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.160>

Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep, Dan Aplikasi PPN*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pranata, Caesa dan Sugeng Santoso. 2018. Analisis Pengaruh Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar Amerika Terhadap Penerimaan PPN (Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa Tengah II). *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 16 (2), 9–12.

Prathama, Rahardja dan Manurung, Mandala. 2010. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.

Puspitha, Putu Vilia, and Ni Luh Supadmi. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Pada Penerimaan PPN (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Se-Bali). *Jurnal Akuntansi*, 22, 1530–1556.

Putra, Windhu. 2019. *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan; Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Robinson, Tarigan. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba.

Rofikayanti, Iin. 2017. *Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pendapatan Perkapita Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru*

Terhadap Penerimaan PPN Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru. UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

Rusman, Tedi. 2015. *Statistika Penelitian: Aplikasinya Dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Salawati. 2008. *Analisis Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN Pada Kanwil DJP Jakarta Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sinambela, Tongam dan Suci Rahmawati. 2019. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5 (1), 83–97.

Songdala, Margareth Juniarti. 2018. *Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015-2017*. Universitas Brawijaya, Malang.

Sudaryana, Bambang. 2018. *Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.

Sukardji, Untung. 2017. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Sukirno, Sadono. 2004. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

———. 2011. *Teori Pengantar Makroekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Indeks.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2015. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme Dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.

Suryani, & Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

TMbooks. 2015. *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Umam, Khotibul. 2020. Jual Beli Valuta Asing Dalam Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 4 (2), 18–35.

Wahyudi, Eddi,. dkk. 2009. Dampak Fluktuasi Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi IPB*, 6 (1).

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian: Populer & Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wijaya, Dewa Made Arta. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Inflasi Regional Terhadap Ppn Dn Di Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 2 (2), 368–77

Wijayanti, Amalia. 2015. *Aanalisis Penerimaan Pajak Indonesia: Pendekatan Ekonomi Makro*. Universitas Diponegoro, Semarang.

Wulansari, Andhita Dessy. 2017. *Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Felicha.

Yulianingtyas, Laily Dwi. 2018. *Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III)*. Universitas Brawijaya, Malang.

LAMPIRAN

Data Penelitian Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Bulan	Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Nilai Tukar Rupiah	Penerimaan PPN
1	2016	Januari	5.59	0.05	13,889.05	74,619,721,334
2		Februari	5.59	0.73	13,515.70	38,702,882,999
3		Maret	5.59	0.62	13,193.14	62,446,326,776
4		April	5.85	-1	13,179.86	95,079,243,234
5		Mei	5.85	-0.37	13,419.65	95,850,921,631
6		Juni	5.85	0.18	13,355.05	148,656,616,143
7		Juli	4.81	1.52	13,118.82	102,847,526,187
8		Agustus	4.81	0.78	13,165.00	116,476,119,397
9		September	4.81	0.64	13,188.24	144,365,792,793
10		Oktober	4.87	0.54	13,017.24	149,373,893,394
11		November	4.87	1.13	13,310.50	165,686,659,491
12		Desember	4.87	-0.01	13,417.67	323,132,451,302
13	2017	Januari	5.01	0.53	13,358.71	105,160,908,081
14		Februari	5.01	0.35	13,340.84	77,871,096,867
15		Maret	5.01	0.02	13,345.50	111,995,854,702
16		April	5.36	-0.3	13,306.39	111,598,549,746
17		Mei	5.36	-0.09	13,323.35	124,981,045,796
18		Juni	5.36	0.32	13,298.25	134,309,269,915
19		Juli	5.4	0.48	13,342.10	128,301,815,530
20		Agustus	5.4	-0.28	13,341.82	147,788,014,216
21		Septem	5.4	0.16	13,303.47	

		ber				134,027,422,753
22		Oktober	5.43	0.22	13,526.00	161,348,977,962
23		Novem ber	5.43	0.46	13,527.36	179,178,366,479
24		Desemb er	5.43	0.68	13,556.21	353,897,059,849
25	2018	Januari	4.71	0.46	13,380.36	116,213,964,773
26		Februari	4.71	-0.1	13,590.05	89,419,159,089
27		Maret	4.71	0.31	13,758.29	84,737,738,099
28		April	5.09	0.02	13,802.95	118,491,850,570
29		Mei	5.09	0.6	14,059.70	106,228,053,182
30		Juni	5.09	0.38	14,036.14	107,808,478,599
31		Juli	5.24	0.56	14,414.50	144,872,962,285
32		Agustus	5.24	-0.37	14,559.86	148,579,702,458
33		Septem ber	5.24	-0.3	14,868.74	134,093,032,771
34		Oktober	5.48	0.81	15,178.87	164,129,353,415
35		Novem ber	5.48	0.27	14,696.86	164,052,241,132
36		Desemb er	5.48	0.18	14,496.95	341,970,888,299
37	2019	Januari	4.81	0.17	14,163.14	114,697,619,463
38		Februari	4.81	-0.45	14,035.21	115,440,601,072
39		Maret	4.81	0.31	14,211.00	100,456,707,621
40		April	5	0.44	14,142.58	110,691,441,097
41		Mei	5	0.85	14,392.81	138,748,396,263
42		Juni	5	1.09	14,226.53	111,532,819,841
43		Juli	5.13	0.84	14,043.91	139,199,932,259
44		Agustus	5.13	-0.07	14,242.05	174,344,238,848
45		Septem ber	5.13	-0.96	14,111.10	172,149,230,378

46		Oktober	5.09	-0.3	14,117.57	263,112,599,530
47		Novem ber	5.09	0.31	14,068.72	200,231,779,013
48		Desemb er	5.09	0.06	14,017.45	359,593,237,558
49	2020	Januari	3.89	0.6	13,732.23	134,988,778,040
50		Februari	3.89	0.2	13,776.15	126,296,733,957
51		Maret	3.89	-0.01	15,194.57	114,728,988,437
52		April	-4.92	-0.41	15,867.43	125,070,684,332
53		Mei	-4.92	0.63	14,906.19	141,111,419,785
54		Juni	-4.92	-0.16	14,195.96	106,997,550,449
55		Juli	-2.91	-0.14	14,582.41	139,314,634,906
56		Agustus	-2.91	0.06	14,724.50	139,579,345,128
57		Septem ber	-2.91	-0.05	14,847.96	150,109,479,956
58		Oktober	-2.23	0.61	14,749.14	162,393,013,326
59		Novem ber	-2.23	0.51	14,236.81	162,826,725,266
60		Desemb er	-2.23	0.67	14,173.09	290,914,464,587
61	2021	Januari	-0.16	0.12	14,061.90	107,210,600,354
62		Februari	-0.16	-0.38	14,042.10	90,809,644,841
63		Maret	-0.16	0.31	14,417.39	97,243,449,454
64		April	5.76	-0.01	14,558.18	125,069,057,146
65		Mei	5.76	0.19	14,323.19	132,156,277,311
66		Juni	5.76	-0.17	14,338.23	127,130,503,176
67		Juli	3.32	-0.09	14,511.19	133,663,361,357
68		Agustus	3.32	-0.13	14,397.70	154,172,752,467
69		Septem ber	3.32	0.1	14,256.96	158,054,842,117
70		Oktober	4.38	0.36	14,198.45	

						168,939,846,796
71		November	4.38	0.65	14,263.50	212,176,187,823
72		December	4.38	0.42	14,328.92	381,774,762,581